

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taman kota merupakan ruang publik yang terbuka hijau untuk dijadikan tempat menghabiskan waktu libur atau sekedar waktu luang di tengah rutinitas. Taman kota yang berfungsi sebagai ruang publik, menjadikan lokasi ini ramai dikunjungi banyak orang. Masyarakat datang melakukan aktivitas yang berbeda-beda, misal ada yang sekedar membaca buku sambil duduk di bawah pohon, *jogging*, dan mungkin ada yang datang ke taman kota dalam misi untuk berdagang. Taman kota sebagai ruang publik menjadikan wadah di mana di dalamnya tempat terjadi interaksi sosial (Carmona, 2003).

Interaksi yang terjadi secara berkelanjutan akan membawa suatu perkembangan, baik dari segi fungsi, penyediaan fasilitas, dan aktivitas yang terjadi di taman kota. Sejatinya tidak ada yang statis, begitu halnya dengan taman kota sebagai ruang publik, seiring berjalannya waktu pasti ada perubahan yang terjadi. Fungsi taman pada tahap perencanaan mungkin saja akan berubah ketika sudah dihadapkan pada realita yang ada. Penyediaan fasilitas taman, tentu akan berubah baik dari segi jumlah yang akan bertambah maupun berkurang. Kemudian aktivitas yang dilakukan

oleh orang-orang yang berada di kawasan taman kota juga akan mengalami suatu perkembangan.

Taman kota merupakan bentuk fasilitas sosial yang dikelola pemerintah kota sehingga taman merupakan fasilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah kota. Taman kota dapat diakses oleh semua warga tanpa ada pungutan biaya. Penyediaan fasilitas sosial dalam bentuk taman merupakan kebijakan dari pemerintah tentang kepedulian terhadap lingkungan. Kesadaran akan pentingnya lingkungan yang asri dan taman sebagai paru-paru kota serta sarana rekreasi, diwujudkan melalui kebijakan operasional dalam bentuk taman-taman kota (Adi, 2008).

Pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau kota merupakan komponen penting yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia, baik secara ekologis maupun sosial-psikologis (Wu, 2008). Namun demikian, keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan menjadi permasalahan karena tingginya kepadatan penduduk akibat pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat, Pembangunan yang tidak terkendali dan perkembangan ekonomi di suatu perkotaan cenderung dapat meminimalkan ruang terbuka hijau (RTH) sehingga berdampak terganggunya keseimbangan ekosistem seperti: perubahan suhu, polusi udara, pencemaran air, permukaan tanah menurun dan bahaya banjir.

Kota Bandung merupakan kota besar yang menjadi Ibukota Provinsi Jawa Barat berada pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut, diapit oleh punggung Gunung Tangkuban Perahu di bagian utara dan Gunung

Malabar di bagian selatan, menjadikan Kota Bandung daerah kota dengan udara yang sejuk dan didominasi ruang terbuka hijau. Pada jaman kolonial belanda Kota Bandung didisain untuk menyatu dengan ruang terbuka hijau seperti penataan kawasan perumahan, taman-taman rekreasi seperti kebun binatang, taman lalu lintas, jalur hijau tepi sungai, seperti jalan Cipaganti, Cihampelas, Pasir Kaliki, serta jalan-jalan utama lainnya dilengkapi dengan jalur hijau dengan taman-taman kota yang tersebar di sudut-sudut kotanya. Keindahan penataan Kota Bandung dahulu diibaratkan sebagai Kota Paris sehingga muncul istilah Paris Van Java.(Pemerintah Kota Bandung, 2009).

Pada awal tahun 2007-2012 kota Bandung mengalami perubahan yang signifikan dimana jumlah penduduk kota Bandung, mengalami perkembangan yang sangat pesat yaitu sekitar 14.950 ribu jiwa pertahun. Hal ini dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di Kota Bandung Tahun 2007-2012

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah penduduk	2.372.234	2.400.340	2.394.697	2.394.873	2.437.874	2.461.931

Sumber : *Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2014*

Melalui tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa penduduk di Kota Bandung pada tahun 2007 terdapat sebanyak 2.372.234 juta jiwa, sedangkan tahun 2012 tercatat sebanyak 2.461.931 juta jiwa telah memadati Kota Bandung. Pertumbuhan penduduk selama 6 tahun terakhir dihitung dari tahun 2007 sampai 2012 yaitu sebesar 89.697 ribu jiwa.

Pesatnya perkembangan penduduk tidak langsung menuntut pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal serta sarana dan prasarana pendukungnya, hal ini mengakibatkan ruang terbuka hijau (RTH) banyak yang dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, pemukiman, industri, jaringan transportasi serta sarana dan prasarana kota lainnya. Selain perkembangan penduduk, Kota Bandung pada tahun 2007-2012 ini menghadapi permasalahan lingkungan yang serius akibat pemerintah lebih mengutamakan kegiatan ekonomi dalam mengembangkan kota, hal ini dilakukan karena pemerintah cenderung mengutamakan kegiatan bisnis dan pembangunan perumahan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi kota. Disisi lain pemerintah enggan mengeluarkan APBD bagi pengadaan RTH yang tidak strategis bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga banyak RTH berkurang dan tidak teroptimalisasikan salah satunya adalah taman kota (Pemerintah Kota Bandung, 2004,2009; Badan Pusat Statistik, 2009, 2012).

Ruang terbuka hijau (RTH) yang dimiliki kota Bandung pada tahun 2011 seluas 1.911 ha (11,42%). Bila mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau bahwasanya proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dan sisanya merupakan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau (RTH) kota Bandung masih belum terpenuhi seluas 3.108 ha (18,58%). Untuk memenuhi kekurangan RTH di kota Bandung

akan semakin sulit mengingat kawasan di kota Bandung sudah terbangun 75% dan terbatasnya dana yang dialokasikan untuk pengembangan RTH (pemerintah Kota Bandung, 2012). Oleh karena itu pada tahun 2012 realisasi ruang terbuka hijau (RTH) yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung hanya sampai kepada pengembangan RTH yaitu dengan menghijaukan lahan kritis (penanganan lahan kritis); inventarisasi dan penataan RTH pekarangan (RTH yang keberadaannya menyatu dengan bangunan perumahan, perdagangan, industri, pendidikan dan perkantoran); inventarisasi, penataan dan penetapan ruang terbuka dan lapangan olahraga sebagai RTH dan; penerimaan fasilitas umum dan fasilitas sosial RTH dari pengembang (Pemerintah kota Bandung 2010, 2012).

Pada hari tataruang 2013, yang dilakukan oleh ahli perencanaan yang memberikan predikat ‘ The Most Liveable City’ (kota ternyaman), kota Bandung bukanlah menjadi kota yang paling nyaman untuk di tinggali karena tidak memenuhi indikator kota ternyaman seperti tata ruang yang baik, rendahnya tingkat kemacetandan polusi, minimnya kawasan kumuh, sungan yang bersih, serta adanya ruang terbuka hijau yang baik. Kota Bandung yang terkenal dengan julukan Paris Van Java sudah bergeser menjadi kota pusat perbelanjaan, dimana tidak terkendalinya pusat-pusat perbelanjaan di kota ini (kartasasmita dan suratman, 2015).

Selain kota Bandung tidak termasuk sebagai kota ternyaman, kota Bandung juga tertinggal bila dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia. Dimana dalam sebuah lomba yang diselenggarakan oleh Kantor Berita

Radio KBR68H bersama Majalah SWA dan diikuti oleh 36 peserta, yang bertajuk *Indonesia Green Region Award (IGRA)* pada tahun 2011 kota Bandung tidak termasuk dalam 10 pinalis seperti Kota Surabaya (Jawa Timur), Kota Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta), Kota Denpasar (Bali), Kota Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Kota Banda Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), Kota Payakumbuh (Sumatera Barat), Kabupaten Kuningan (Jawa Barat), Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), Kabupaten Jepara (Jawa Tengah), dan Kabupaten Gorontalo (Gorontalo). Dari hasil seleksi yang dilakukan dewan juri, lima kota/kabupaten yang akhirnya menjadi pemenang adalah Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Palangkaraya, dan Banda Aceh. Kota Bandung tidak muncul sebagai pemenang, bahkan sebagai finalis pun kota Bandung tidak masuk.

Mengingat pentingnya ruang publik, pemerintah menetapkan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Sedangkan dalam Pasal 28 ditegaskan perlunya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di dalam suatu kota. Terkait dengan ruang publik maka RTH Publik dan RTNH Publik yang disediakan untuk publik dapat dikategorikan sebagai ruang publik. Bentuk RTH yang akan dikembangkan di kota sebagai ruang publik, salah satunya adalah taman kota. (Siahaan, 2010).

Dalam rangka menjadikan Bandung sebagai kota berbasis lingkungan, pada tahun 2013 ruang terbuka hijau (RTH) terutama Taman Kota mendapat perhatian serius oleh Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung baru periode (2013-2018), menjalankan program untuk membangun berbagai taman

tematik. Gagasan taman tematik yang dikelola oleh warga merupakan upaya menjadikan taman sebagai ruang kehidupan sosial bagi masyarakat. Sebagai bagian dalam kegiatan sosial masyarakat yang memberi manfaat sebagai ruang terbuka tempat silaturahmi antar warga. Tema-tema yang diusung merupakan hasil pemikiran pemerintah maupun aspirasi masyarakat. Revitalisasi taman tematik tersebut selain bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, juga berfungsi sebagai objek wisata alternatif. Walikota Bandung menyebutkan, kehadiran taman tidak sekadar ada tanaman rindang, bunga dan fasilitas lainnya, namun yang penting adalah ada orang yang mengunjunginya sehingga dengan adanya taman tematik, taman-taman di Kota Bandung akan hidup dan produktif.

Sejak awal terpilih walikota Bandung Ridwan Kamil, telah mencanangkan salah satu program kerjanya yaitu membangun sebanyak mungkin ruang publik. konsep ini dilatarbelakangi oleh target pembangunan kota yang lebih bertujuan meningkatkan nilai indeks kebahagiaan warga kota Bandung. Menurut Ridwan Kamil, kondisi warga Bandung saat itu mengarah pada ciri kota yang sakit, dimana warganya enggan berinteraksi diluar rumah. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan ruang publik yang representatif. Sebelum Ridwan Kamil orang enggan untuk datang ke taman, karena taman tidak terawat sehingga lebih terkesan kusam dan menyramkan, bahkan beberapa taman lebih dikenal dengan hal-hal negatif seperti tempat mangkal waria ataupun tempat anak muda bertukar narkoba.

Salah satu kebijakan Pemkot Bandung terhadap ruang terbuka hijau (RTH) yaitu merenovasi alun-alun yang kumuh agar bisa digunakan sebagaimana fungsinya untuk terciptanya *Positive space*. yaitu berupa ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan dikelola oleh pemerintah (Carmona, et al: 2008, p.62). Sejak direnovasinya alun-alun kota Bandung sejak akhir tahun 2014 hingga diresmikannya pada awal tahun 2015, Kota Bandung ramai diperbincangkan oleh publik dan di media massa, karena walikota Bandung berhasil menata ulang alun-alun dengan menambahkan fasilitas seperti tempat bermain anak, taman bunga yang bermacam-macam warna, tanah alun-alun yang dilapisi oleh rumput sintetis, perpustakaan, halte bis dengan tempat duduk berbentuk tulisan alun-alun Bandung dan layanan internet gratis. Seperti Gambar dibawah ini kondisi Alun-alun Bandung setelah direvitalisasi dan sebelum di revitalisasi:

Gambar1.1 Alun-alun Bandung Setelah direvitalisasi



Gambar 1 Desain Alun-Alun Bandung Periode 2014.
Sumber: Putra dkk: 2015.

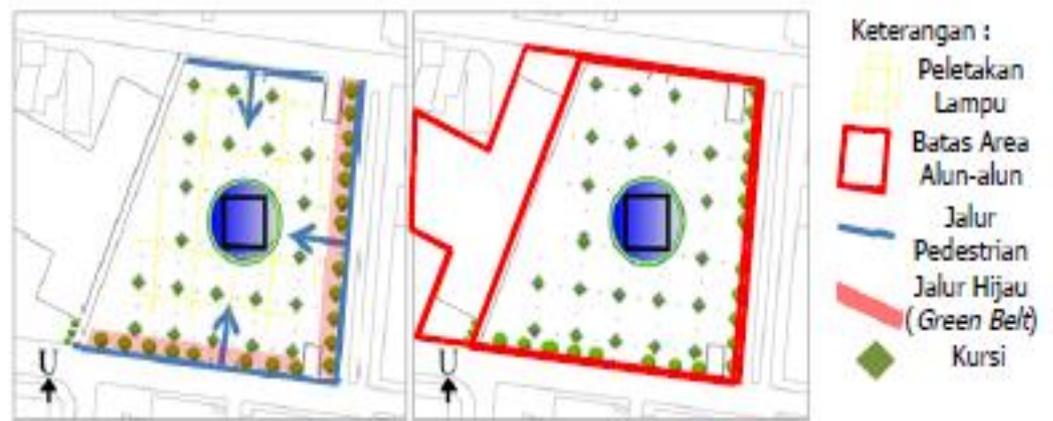
Gambar1.2 Alun-alun Bandung etelah direvitalisasi



Gambar 2: Suasana dan Aktifitas Yang Terjadi Pada Alun-Alun Bandung Tahap ke-7 Sumber : Putra dkk: 2015.

Sebelum direvitalisasi Alun-alun merupakan sebuah plaza dengan presentase elemen perkerasan lebih dominan dibanding dengan elemen perlunakan yang bersifat taman pasif seperti Gambar di bawah ini:

Gambar1.3 Alun-alun Bandung etelah direvitalisasi



Analisis Jalur Hijau Kota dan Jalur Pedestrian
Sumber: Nirmala, 2006

Alun-alun Bandung tahap ini memiliki elemen lansekap pada sisi selatan dan timur berupapohon-pohon besar. Terdapat banyak lampu penerangan dan terdapat banyak kursi yang disimpan di sisi-sisi taman kecil yang berbentuk persegi dan kolam. Pada area luar alun-alun terdapat pedestrian yang digunakan sebagai akses masukke dalam alun-alun. Pada tahun ini bentuk alun-alun berupa trapesium. Pada tahun 2002 sebutan taman kota pada alun-alun berubah menjadi plaza, dimana plaza ini merupakan hasil tergabungnya Masjid Agung dengan alun-alun dengan menghilangkan jalan pada sisi barat dan menghilangkan jembatan akses Masjid Agung menuju alun-alun, sehingga alun-alun kini merupakan plaza dari bangunan Masjid Agung.

Perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum (Taman Kota) bagi masyarakat Kota Bandung ternyata juga telah meningkatkan daya tarik Kota

Bandung bagi wisatawan untuk datang ke Kota Bandung. Sejak tahun 2012 tren jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2012 wisatawan yang datang mencapai 3.354.857 orang dan meningkat 10,92 persen menjadi 3.726.447 orang pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 49,01persen sehingga total wisatawan yang datang mencapai 5.627.421 orang (Statistik Daerah Kota Bandung, 2015).

Tabel 1.2 Data Kunjungan Wisatawan Ke Kotra Bandung

Tahun	Jumlah Kunjungan	Pertumbuhan
2012	3.354.857	
2013	3.726.447	10,92%
2014	6.627.421	49,01%

Sumber : BPS Kota Bandung 2015

Alasan Pemerintah Kota Bandung membangun banyak taman tematik ini adalah untuk meningkatkan indeks kebahagiaan seperti yang dijelaskan saat penutupan *Speech Conference & Expo Indonesia Knowledge Forum III* 2014 di Jakarta, Jumat (10/10/2014) yang di tulis oleh Sutriyanto (2014) "Inovasi *happiness* adalah konsep yang Ridwan Kamil usung untuk memperbaiki *value* di Bandung," Selain itu, alasan lain adalah menyediakan sarana untuk mengembangkan kreativitas anak muda, "Tahun depan kami akan membuat Bandung *creativecenter*, yang memungkinkan anak-anak kreatif bisa mewujudkan apa yang menjadi talentanya". Indeks kebahagiaan warga kota Bandung pada tahun 2015 meningkat, setelah walikota Bandung

membangun taman-taman tematik sebagai ruang publik. Indikator keberhasilan penataan ruang publik tersebut dapat dilihat dari nilai indeks kebahagiaan warga kota Bandung selama setahun terakhir. Survey yang dirilis oleh BPS kota Bandung pada tahun 2015 menunjukkan angka indeks kebahagiaan warga kota Bandung adalah 70,60 pada skala 0-100 yang termasuk pada kategori Bahagia (50-75). Terbayang jika pembangunan ruang publik yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung semakin masif beberapa tahun ke depan, bukan tidak mungkin angka tersebut dapat meningkat menjadi sangat bahagia (level 75-100). Setelah banyak taman yang di renovasi dan ditambahkan fasilitas yang mendukung masyarakat seperti *WiFi* atau internet gratis kini semakin banyak warga beraktifitas di taman-taman kota. Sedemikian atraktifnya taman-taman kota, bukan hanya warga Bandung saja yang tertarik untuk mendatanginya, warga luar kota pun banyak yang tertarik untuk menikmatinya setiap akhir pekan.

Menurut Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung pada tahun 2015 sudah ada 15 taman tematik yang sudah selesai direvitalisasi dan bisa dinikmati oleh masyarakat, sebagaimana dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Alamat Taman Tematik di Kota Bandung

No	Nama Taman Tematik	Alamat
1	Taman Jomlo	Jl. Cikapayang
2	Taman Sketboard	Bawah Jembatan Pasopati
3	Taman Film	Bawah Jembatan Pasopati
4	Taman Persib	Jl. Supratman
5	Taman Kandaga Puspa	Jl. Ciliki
6	Taman Musik Sentrum	Jl. Belitung
7	Taman Anak Tongkeng	Jl. Tongkeng
8	Taman Fotografi	Jl. Cempaka
9	Pet Park	Jl. Cilaki
10	Taman Lansia	Jl. Cilaki
11	Taman Lalu Lintas	Jl. Belitung
12	Taman Vanda	Jl. Merdeka
13	Taman Fitnes	Jl. Imam Bonjol- Jl. Teuku Umar
14	Taman Gesit	Jl. Dipati Ukur
15	Taman Balai Kota	Jl. Merdeka - Jl. Wastukencana

Sumber: Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung (2013-2015)

Adanya perubahan yang signifikan terhadap Taman-taman yang ada di Kota Bandung yaitu pada tahun 2013-2016 oleh pemerintah, maka dari itu peneliti tertarik mengambil judul “*Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Taman Kota Bandung Tahun 2013-2016 (Studi Kasus Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *“Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Taman Kota Bandung Tahun 2013-2016 (Studi Kasus Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung)”*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *“Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Taman Kota Bandung Tahun 2013-2016 (Studi Kasus Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung)”*.

D. Kerangka Dasar Teori

Teori terdiri dari berbagai keterkaitan yang masuk akal yang terjadi diantara konsep-konsep dengan serangkaian konsep. Tanpa konsep tidak akan ada pengetahuan ilmiah yang bersifat teoritis dan sistematis yang masuk akal dalam pemahaman ilmiah (Norman dan Yvonnas, 2009:355). Untuk itu landasan teori disajikan untuk landasan keilmuan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian (Kusmana, 2010: 114-115).

Dengan landasan teori tersebut maka kegiatan penelitian ini menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Teori mempunyai peran yang cukup besar dalam suatu penelitian, di karenakan dengan unsur inilah peneliti akan mencoba menerangkan fenomena-fenomena sosial atau gejala-gejala alami yang menjadi pusat perhatian.

Dalam hal ini beberapa definisi mengenai teori, menurut Snelbecker teori merupakan seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk memprediksi dan menjelaskan fenomena yang diamati (Snelbecker, 1974:31).

Menurut Marx dan Goodson teori ialah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati diantara kejadian-kejadian yang dapat diukur (2), mekanisme atau struktur yang dapat diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung.

Berdasarkan beberapa pengertian teori diatas dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud teori adalah seperangkat proposisi yang berinteraksi mengikuti aturan tertentu, yang dapat dihubungkan secara logis dalam mengamati fenomena alamiah yang terdiri dari kejadian-kejadian yang dapat diukur, mekanisme yang menjadi dasar suatu hubungan fenomena alamiah serta manifestasi hubungan empiris terhadap fenomena yang diamati. Maka dari itu landasan pemikiran yang akan di gunakan sebagai kerangka dasar penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan

Bila kebijakan publik dipandang sebagai pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahapan terakhir dari proses kebijakan itu (Winarno, 2007:225). Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan berjalan dengan baik dalam meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab kegagalan suatu kebijakan atau mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan atau tidak. Jika evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan fungsional maka evaluasi kebijakan meliputi tahap perumusan masalah, program yang diusulkan dalam menyelesaikan masalah, implementasi kebijakan serta dampak dari kebijakan itu (Winarno, 2007:225). Maka dari itu evaluasi kebijakan disebut sebagai suatu kegiatan yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak dari suatu kebijakan yang di buat.

a. Pengertian Tentang Evaluasi

Menurut William N Dunn istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap

nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan, target serta evaluasi memberikan sumbangan aplikasi metode-metode analisis kebijakan (Dunn, 2003:608)

Evaluasi dapat membantu pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah yang telah terselesaikan, melainkan menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan. Riant Nugroho memberikan definisinya mengenai pengertian evaluasi sebagai berikut:

“Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Dalam hal ini evaluasi bukanlah hal untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan sistem pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan public” (Nugroho, 2003:184).

Evaluasi merupakan salah satu aspek yang vital dalam melakukan pengawasan terhadap suatu kebijakan, dengan evaluasi dapat diketahui segala penyimpangan serta kemajuan ataupun hasil dari kegiatan yang telah berjalan dari sesuatu yang telah dilakukan/dibuat. Evaluasi dapat mengukur apakah suatu kebijakan yang telah dibuat telah mencapai tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan awal dibuatnya kebijakan tersebut. Dengan evaluasi kita dapat membenahi suatu kebijakan agar lebih baik dan bermanfaat bagi para pelaksana kebijakan tersebut, sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Worthen dan Sanders mengemukakan pendapatnya mengenai evaluasi, mengatakan bahwa: “Evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (*worth*). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula” (Worthen dan Sanders, 1979: 1).

Evaluasi tidak hanya menyangkut suatu proses, evaluasi merupakan cara untuk mengetahui mengenai sesuatu yang berharga dan merupakan tolak ukur atas hasil Definisi evaluasi yang dikemukakan oleh Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Proses Kebijakan Publik” yaitu: “Evaluasi dilakukan karena kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan untuk melihat sebab-sebab kegagalan. Suatu evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang di inginkan. Dalam bahasa yang lebih sempit, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan” (Winarno, 2002:165)

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa dengan evaluasi maka akan dapat diketahui apakah suatu kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan telah berhasil atau gagal mencapai tujuan awal dibuatnya kebijakan tersebut dan berdampak sesuai dengan apa yang

diinginkan. Dengan evaluasi pula maka akan terlihat seberapa jauh manfaat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Evaluasi diperlukan untuk mengetahui dampak positif dan negatif atas dikeluarkannya suatu kebijakan, dan evaluasi dilakukan untuk menilai manfaat serta tujuan dibuatnya kebijakan tersebut oleh para pihak yang berkewajiban mengevaluasi kebijakan tersebut.

b. Pengertian Tentang Kebijakan

pengertian kebijakan menurut Dunn kata kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *policy* dalam bahasa latin kita ini berubah menjadi *politia*, artinya negara. Masuk kedalam bahasa Inggris lama (*midde English*) kata tersebut menjadi *policie*, yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintahan atau administrasi pemerintahan (Abidin, 2002:16).

Menurut Inu Kencana Syafie dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Pemerintahan” mengutip pendapat Harold Laswell bahwa kebijakan adalah: “Tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan”(Laswell dalam Syafie, 1992: 35).

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan

dengan kebijaksanaan. Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

M.Irfan Islamy juga mengemukakan pengertian kebijakan dalam bukunya yang berjudul “Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara” adalah: “Kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah”(Islamy, 1997: 14).

Menurut Anderson dalam Tachjan mengatakan mengenai kebijakan yakni, bahwa: “Kebijakan adalah serangkaian kebijakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan” (Anderson dalam Tachjan, 2006: 19).

Sesuai dengan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan sesuatu yang dibuat untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Kebijakan dibuat untuk kemudian dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan isi dari kebijakan yang telah dibuat/dirumuskan.

Sedangkan Menurut Carl Friedrich yang dikutip dalam Wahab mengatakan bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah

pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan” (Wahab, 2001: 10).

Kajian tentang kebijakan dalam arti yang luas sebagai usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan tahu arti keputusan. Kajian ini dilakukan mulai dari cara yang paling sederhana dan irasional sampai dengan cara-cara yang bersifat kombinasi kuantitatif dan kualitatif sekarang ini.

Said Zainal Abidin, alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US. Mengatakan Kebijakan merupakan: “Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya”(Said Zainal Abidin, 2004: 23).

Suatu kebijakan publik mempunyai sifat yang luas dan berada pada strata strategis. Kebijakan publik mempunyai fungsi sebagai pedoman untuk kebijakan atau keputusan-keputusan khusus yang berada dibawahnya. Suatu efektivitas kebijakan publik dapat dilihat dari sejauhmana suatu kebijakan yang dibuat telah dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, serta dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengacu kepada kebijakan tersebut.

William N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Analisis Kebijakan Publik” adalah: “Kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan- keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintahan”(Dunn, 2003: 132).

Kebijakan publik tidak hanya menyangkut suatu pedoman. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah untuk membatasi suatu tindakan-tindakan yang keluar dari aturan/norma yang telah ditentukan untuk dipatuhi. Kebijakan publik merupakan suatu pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung. Dengan adanya suatu kebijakan publik maka diharapkan dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik dan positif bagi masyarakat.

c. Pengertian Tentang Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak bisa lepas begitu saja, kebijakan harus diawasi. Dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut ialah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Dunn mengemukakan pendapatnya tentang pengertian fungsi evaluasi kebijakan, bahwa: “Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, dan yang paling penting evaluasi memberikan informasi yang *valid* dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai” (Dunn, 2003: 609).

Sesuai dengan pendapat diatas, maka dapat diketahui bahwa evaluasi kebijakan memiliki banyak fungsi dan dengan melakukan evaluasi kebijakan akan dapat diketahui informasi yang sesuai dan dapat di petanggung jawabkan mengenai hasil dari kebijakan yang telah dibuat dan dicapai.

Sementara itu menurut Samodra Wibawa (1994:10-11) mengatakan evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu pelaksanaan dan setelah dilaksanakan. Evaluasi sebelum pelaksanaan yang disebut “William Dunn (1999)” sebagai sumber *summative*. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut *evaluasi proses*. Evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan evaluasi pengaruh (*outcome*) kebijakan.

Terlepas dari berbagai permasalahan seputar fungsi evaluasi kebijakan, pada hakekatnya evaluasi kebijakan ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas serta sumber daya pendukung yang jelas

pula untuk mengetahui dan menilai sejauhmana suatu kinerja kebijakan berjalan.

Hessel Nogi Tangkilisan dalam bukunya “Evaluasi Kebijakan Publik” menjelaskan mengenai pengertian evaluasi kebijakan publik yaitu: “Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu dari tahapan proses kebijakan yang kritis dan penting, karena proses ini melibatkan bukan hanya evaluator dari kalangan akademisi dan praktisi, namun juga melibatkan komponen masyarakat lainnya, sehingga tercipta kondisi dimana tidak adajarak antara kebijakan publik dengan masyarakat.”(Tangkilisan,2003:7)

Kata evaluasi yang dibicarakan disini adalah evaluasi kebijakan pemerintah, maka kalanga akademis maupun praktisi yang dimaksud diatas adalah pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam menetapkan adanya suatu kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan menguraikan teori yang dipilih untuk dijadikan acuan dalam penulisan laporan Skripsi ini, sesuai judul yang peneliti pilih. Berikut adalah pengertian evaluasi kebijakan yang diungkap oleh William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Analisis Kebijakan Publik”, yaitu: “Evaluasi kebijakan pada prinsipnya adalah “proses yang dilakukan untuk menilai sebuah kinerja kebijakan yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan” William N. Dunn (2003: 158).

Sesuai dengan pengertian evaluasi kebijakan yang di ungkap oleh William N. Dunn diatas, maka Dunn mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yaitu:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

(William N. Dunn, 2003: 158).

2. Tinjauan Tentang Revitalisasi

a. Pengertian Revitalisasi

Menurut Direktorat Kota-Desa Wilayah-Timur di Jakarta (2004) disepakati bahwa penataan dan revitalisasi kawasan adalah rangkaian upaya untuk menata kawasan yang tidak teratur, meningkatkan kawasan yang memiliki potensi dan nilai strategis dan mengembalikan vitalitas kawasan yang telah atau mengalami penurunan, agar kawasan-kawasan tersebut bisa mendapatkan nilai tambah yang optimal terhadap produktivitas ekonomi, sosial dan budaya kawasan perkotaan.

Martokusomo mendefinisikan revitalisasi sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menghidupkan kembali suatu tempat yang

memiliki potensi dalam bentuk pusaka alam dan budaya sehingga menjadi vitalisasi kegiatan masyarakat dalam sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, utilitas yang baik, pemugaran serta pelestarian (*Jurnal Administrasi Bisnis(JAB)*), Vol. 37 No. 1, 16). Revitalisasi dalam Piagam Burra (1981) dinyatakan sebagai upaya merubah tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai, yaitu kegunaan yang tidak menuntut perubahan drastis atau hanya melakukan sedikit perubahan (jurnal diah intan, hal:2) Sedangkan Shidarta dan Budihardjo (1989) mengemukakan revitalisasi adalah merubah tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai. Sedangkan makna sesuai fungsinya adalah kegunaan yang tidak menuntut perubahan drastis, atau yang hanya memerlukan sedikit dampak minimal.

Laretna (2003), membagi kegiatan revitalisasi atas tiga bagian pokok yakni: (1) Konsep, adalah menghidupkan kembali suatu tempat yang memiliki aset potensial berupa pusaka alam dan budaya atau saujana budaya (*cultural landscape*), sebagai salah satu upaya pelestarian. (2) Tujuan, mewujudkan kembali vitalitas kawasan baik dalam kegiatan sosial-budaya, ekonomi maupun infrastruktur, dukungan utilitas, pemugaran ataupun pengembangan lainnya, hingga tercapai tujuan pelestariannya. (3) Obyek, bentuk kegiatan, dan pihak-pihak terkait sebenarnya tidak ada bedanya dengan upaya pelestarian. Namun ada beberapa aspek yang diprioritaskan dalam revitalisasi yaitu:

- a. Vitalisasi pusaka budaya yang ada, juga kehidupan masyarakatnya ditonjolkan
- b. Nilai ekonomi masyarakat dan lingkungan meningkat, mampu memberi lebih banyak lapangan pekerjaan baru, dan peningkatan pendapatan.

Dari pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwasanya Revitalisasi adalah upaya untuk menata kembali suatu wilayah yang sudah mati; meningkatkan kawasan yang sudah hidup; menyuntikan sesuatu yang baru (aktivitas dan bangunan) pada suatu kawasan. Melalui peningkatan kualitas fisik dengan tujuan meningkatkan vitalitas sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik wilayah tersebut.

b. Rencana dan Kegiatan Revitalisasi

Revitalisasi merupakan rangkaian kegiatan untuk menata kembali suatu kawasan yang tidak teratur menjadi kawasan yang memiliki potensi dan nilai strategis serta mengembalikan vitalitas kawasan yang telah atau mengalami penurunan, agar kawasan-kawasan tersebut bisa mendapatkan nilai tambah yang optimal terhadap produktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Martokusumo (2005) menjelaskan bahwa rencana revitalisasi harus dilandasi oleh intervensi fisik, dukungan ekonomi dan rekayasa sosial. (1) Intervensi fisik yaitu meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas maupun kondisi fisik bangunan, (2) Revitalisasi ekonomi adalah Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses perbaikan kegiatan

ekonomi, (3) Revitalisasi sosial adalah suatu keberhasilan menciptakan suatu kawasan yang menarik.

Laretna (2003), membagi kegiatan revitalisasi atas tiga bagian pokok yakni :

1. Konsep, adalah menghidupkan kembali suatu tempat yang memiliki aset potensial berupa pusaka alam dan budaya atau saujana budaya (*cultural landscape*), sebagai salah satu upaya pelestarian.
2. Tujuan, mewujudkan kembali vitalitas kawasan baik dalam kegiatan sosial-budaya, ekonomi maupun infrastruktur, dukungan utilitas, pemugaran ataupun pengembangan lainnya, hingga tercapai tujuan pelestariannya.
3. Obyek, bentuk kegiatan, dan pihak-pihak terkait sebenarnya tidak ada bedanya dengan upaya pelestarian. Namun ada beberapa aspek yang diprioritaskan dalam revitalisasi yaitu: Vitalisasi pusaka budaya yang ada, juga kehidupan masyarakatnya ditonjolkan; Nilai ekonomi masyarakat dan lingkungan meningkat, mampu memberi lebih banyak lapangan pekerjaan baru, dan peningkatan pendapatan.

c. Dampak dari Revitalisasi

Evaluasi dalam hubungannya dengan perubahan diharapkan terjadi sebagai dampak atau outcomes dari suatu kebijakan, maka dari itu untuk mengetahui kondisi dan akibat dari obyektifnya suatu

kebijakan terhadap sosial digunakan statistik sebagai tolak ukurnya. Dalam kenyataan dampak dari suatu kebijakan tidak selalu sesuai dengan perencanaan semula disebabkan ketidakpastian lingkungan administrasi dalam melaksanakan suatu kebijakan maka dari itu (Hogwood:1983) mengemukakan bahwasanya suatu kebijakan tidak boleh merasa cukup sekedar berakhir hanya pada selesainya pelaksanaan saja, sebelum ada evaluasi akhir atas dampak yang dihasilkan (Abidin, 2002;213).

Sejalan dengan pendapat Hogwood (Wibawa dkk, 1994: 54-61) mengelompokkan dampak atas sebuah kebijakan atas lima bagian yaitu:

a. Dampak individual

Dampak terhadap individu yaitu dampak yang menyentuh terhadap aspek-aspek biologis atau fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi, sosial serta personal sebagai contoh, aspek ekonomi yaitu dampak ekonomi terhadap para pekerja, pemilik modal dan konsumen. Dampak terhadap para pekerja berupa naik atau turunnya pendapatan, karena karena kondisi pekerjaan yang berubah, dampak terhadap para pemilik modal yaitu terjadinya naik turun keuntungan yang diperoleh, sementara dampak terhadap konsumen yaitu terjadi naik turunnya harga serta kualitas barang.

b. Dampak organisasional

Yaitu dampak yang terjadi terhadap sebuah organisasi, baik dampak itu dirasakan secara langsung maupun tidak. Dampak langsung yaitu terbantu atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya misalnya kebijakan terhadap organisasi buruh dimana dapat menimbulkan agresifitas organisasi ini tetapi kebijakan ini pula dapat memberikan semangat kerja karyawan, yang bermuara kepada efektivitas organisasi produksi. Dampak tidak langsung yaitu terjadi peningkatan semangat kinerja para anggota organisasi.

c. Dampak terhadap masyarakat

Masyarakat bukanlah unit sosial yang goal-oriented seperti organisasi pada umumnya. Masyarakat ada karena untuk melayani individu-individu anggotanya dengan sebaik mungkin, maka dari itu dampak dari sebuah kebijakan terhadap masyarakat menunjukkan kepada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani individu-individu anggotanya sebagai contoh, pembangunan disebuah plaza yang dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat akan terlibat dalam pembuatan plaza tersebut. Jika sebelumnya masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan plaza ini akan terjadi berbagai macam friksi, dimana sebelumnya tidak terjadi kesepakatan bulat terhadap persoalan pembangunan plaza.

d. Respon terhadap dampak kebijakan

Masyarakat merupakan individu-individu yang homogen yang satu sama lain memiliki pandangan tersendiri terhadap sesuatu. Begitu pula halnya dengan sebuah kebijakan akan memiliki pandangan serta respon tersendiri terhadap sebuah kebijakan, respon individual terhadap kebijakan akan beragam seperti ada yang apatis (tidak mau tahu atau menolak seluruh kegiatan), tekanan politis yang dirasakan secara individual, tekanan politis yang dirasakan secara kolektif, meminta pelayanan baru, misalnya meminta fasilitas tambahan serta melakukan penyesuaian psikologis.

3. Tinjauan Tentang Taman Kota

a. Pengertian Tentang Taman Kota

Taman (Garden) diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Gan berarti melindungi atau mempertahankan lahan yang ada dalam suatu lingkungan berpagar, Oden berarti kesenangan, kegembiraan, dan kenyamanan. Secara lengkap dapat diartikan taman adalah sebidang lahan berpagar yang digunakan untuk mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dan kenyamanan (Laurie, 1986 : 9). Dari batasan dapat diambil pengertian sebagai berikut :

1. Taman merupakan wajah dan karakter bahan atau tapak, berarti bahwa menikmati taman mencakup dua hal, yaitu penampakan visual, dalam arti yang bisa dilihat dan penampakan karakter dalam arti apa yang tersirat dari taman tersebut.

2. Taman mencakup semua elemen yang ada, baik elemen alami (natural), elemen buatan manusia (artificial), bahkan makhluk hidup yang ada didalamnya, terutama manusia.

Kota adalah tempat berlangsungnya proses hidup dan kehidupan atau sebagai tempat berlangsungnya aktifitas manusia (Setiyaningrum, 2002:4). Kota merupakan suatu bentuk ekosistem yang berada di dalam makrokosmos. Ekosistem kota merupakan salah satu bentuk lingkungan buatan (*man-made environment*). Disebut lingkungan buatan, karena lingkungan buatan ini terbentuk dari berbagai macam kegiatan (aktifitas) manusia. Dari penjelasan diatas yang dimaksud Taman Kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota.

Taman kota menurut Arifin (1991) adalah kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dalam memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat baik aktif maupun pasif. Menurut Carr (1992:3) taman kota merupakan wadah kegiatan fungsional maupun aktivitas ritual yang mempertemukan sekelompok masyarakat, dalam rutinitas normal kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan periodik.

b. Unsur-Unsur Taman Kota

Taman kota merupakan suatu bentuk aksi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota. Menurut Carr et al. dalam Carmona

dkk.(1993), taman kota (urban park) dalam suatu permukiman akan berperan efektif dan bermanfaat jika mengandung unsur antara lain:

1. *Comfort*, merupakan unsur keamanan pengguna dari gangguan.

Merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan ruang publik. Lama tinggal seseorang berada di ruang publik dapat dijadikan tolok ukur comfortable tidaknya suatu ruang publik. Dalam hal ini kenyamanan ruang publik antara lain dipengaruhi oleh: environmental comfort yang berupa perlindungan dari pengaruh alam seperti sinar matahari, angin, physical comfort yang berupa ketersediannya fasilitas penunjang yang cukup seperti tempat-tempat duduk sebagai *social and psychological comfort*.

2. *Relaxation*, merupakan kenyamanan dengan unsur buatan manusia.

Merupakan aktivitas yang erat hubungannya dengan *psychological comfort*. Suasana rileks mudah dicapai jika badan dan pikiran dalam kondisi sehat dan senang. Kondisi ini dapat dibentuk dengan menghadirkan unsur-unsur alam seperti tanaman/pohon, air dengan lokasi yang terpisah atau terhindar dari kebisingan dan hiruk pikuk kendaraan di sekelilingnya.

3. *Passive and Active engagement*, merupakan unsur kegiatan yang bersifat aktif maupun pasif.

Kegiatan pasif dapat dilakukan dengan cara duduk-duduk atau berdiri sambil melihat aktivitas yang terjadi di sekelilingnya atau melihat pemandangan yang berupa taman, air mancur, patung

atau karya seni lainnya. Sedangkan untuk kegiatan aktif apabila taman tersebut dapat mewadahi aktivitas kontak/interaksi antar anggota masyarakat lainnya seperti teman, tetangga, famili atau orang asing dengan baik.

4. *Discovery*, merupakan unsur kegiatan yang bersifat atraktif.

Merupakan suatu proses mengelola ruang publik agar di dalamnya terjadi suatu aktivitas yang tidak monoton. Aktivitas dapat berupa acara yang diselenggarakan secara terjadwal (rutin) maupun tidak terjadwal diantaranya berupa konser, pameran seni, pertunjukan teater, festival, pasar rakyat (bazaar), serta promosi dagang.

c. Fungsi Taman

Irwan (1996) menyatakan bahwasanya fungsi Taman Kota dikelompokkan menjadi tiga fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Lansekap, yang meliputi:

- a. Fungsi fisik.
- b. Fungsi Sosial.

2. Fungsi Pelestarian Lingkungan, yang meliputi:

- a. Menyegarkan udara atau sebagai paru-paru kota.
- b. Menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembaban uap air di atmosfer yang mengatur suhu panas (suhu udara) .

- c. Sebagai ruang hidup satwa (habitat), vegetasi selain sebagai produsen pertama dalam ekosistem juga dapat menciptakan ruang hidup (habitat) makhluk hidup lainnya.
- d. Penyangga dan perlindungan permukaan air tanah dari erosi.
- e. Pengendalian dan mengurangi polusi udara dan limbah.
- f. Tempat pelestarian plasma muftah dan bioindikator dan
- g. Menyuburkan tanah.

3. Fungsi Estetika

Estetika kaitannya hubungan taman kota dengan lingkungan disekitarnya seperti rekreasi, ukuran, bentuk warna, tekstur tanah, serta komposisi tanah. Estetika akan menjadi persepsi seseorang dalam menilai sesuatu yang nampak, dalam hal ini taman kota apakah akan memberikan kesegaran terhadap lingkungan yang serba keras.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan pembatasan pengertian antara konsep satu dengan konsep yang lainnya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman berdasarkan kepada teori yang telah dipaparkan. Berdasarkan penjelasan teori-teori para ahli sebelumnya maka beberapa penjelasan definisi konseptual yang berikan antara lain:

Evaluasi Kebijakan: Suatu proses yang dilakukan untuk menilai sebuah kinerja kebijakan yang telah dihasilkan setelah kebijakan tersebut dibuat.

Revitalisasi: Upaya untuk menata kembali suatu wilayah yang sudah mati pada suatu kawasan dengan tujuan meningkatkan vitalitas sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik wilayah tersebut.

Taman Kota: Lahan terbuka yang ditata sedemikian rupa atau hasil rekayasa manusia yang memberikan rasa nyaman dan aman, yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana rekreasi, edukasi dan kegiatan lainnya di tingkat kota yang dikelola oleh pemerintah kota.

F. Definisi Oprasional

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam revitalisasi Taman Kota tahun 2013-2016. Maka ada enam indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan revitalisasi taman kota tersebut, adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas
 - a. Tujuan kebijakan revitalisasi taman kota Bandung
 - b. Realisasi kebijakan revitalisasi taman kota Bandung
2. Efisiensi
 - a. Aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan revitalisasi taman kota Bandung
 - b. Anggaran untuk kebijakan revitalisasi taman kota Bandung

3. Kecukupan

- a. Hasil dan capaian dari kebijakan revitalisasi taman kota Bandung

4. Perataan

- a. Sosialisasi pelaksanaan kebijakan revitalisasi taman kota Bandung

5. Responsivitas

- a. Respon Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dan Dinas lain setelah kebijakan revitalisasi taman kota Bandung direalisasikan

- b. Respon masyarakat setelah kebijakan revitalisasi taman kota Bandung direalisasikan

6. Ketepatan

- a. Dampak bagi Pemerintah setelah kebijakan revitalisasi taman kota Bandung direalisasikan

- b. Dampak bagi masyarakat setelah kebijakan revitalisasi taman kota Bandung direalisasikan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Moleong (2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2007).

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo serta dokumen resmi lainnya dari orang-orang yang dapat diamati. Penelitian deskriptif untuk mendeskripsi dan menafsirkan data secara sistematis, faktual dan akurat berkenaan dengan situasi yang terjadi, sikap dan pandangan yang menggejala di masyarakat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pemakaman dan Pertamanan (DISKAMTAM) Kota Bandung.

3. Unit Analisa

Unit analisis data merupakan objek analisis yang dijadikan obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Dinas Pemakaman dan Pertamanan (DISKAMTAM) Kota Bandung.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan hasil pengamatan secara langsung peneliti dilapangan (observasi) di Dinas Pemakaman dan Pertamanan (DISKAMTAM) Kota Bandung.

Tabel 1.4 Data Primer

Data Primer	Sumber
wawancara	Bapak Aming Priyatna selaku kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan DPKP3 Kota Bandung Bapak Dwi Priyono sebagai seksi pembangunan pertamanan DPKP3 kota Bandung

b. Data sekunder

Data yang didapat dari kajian-kajian sumber yang digunakan berupa Perundang-undangan, peraturan Wali Kota, Peraturan Daerah, arsip atau dokumen dari Dinas terkait dan dilakukan dengan melakukan survei instansi dan studi literatur atau dokumen terkait yang sesuai dengan pembahasan penelitian

Tabel 1.5 Data Primer

Data Sekunder	Sumber
Dokumentasi	Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Peraturan Walikota No: 1384 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung
	Buku Saku Bidang Pertamanan Taman Tematik Bandung tahun
	Data Taman Perkecamatan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung tahun 2016 hal 39

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian bertujuan untuk mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui haruslah dicapai dengan metode yang efisien dan akurat (Azwar,2001:91.92). Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ilmiahnya, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi Langsung yaitu suatu proses atau bentuk observasi pengumpulan data dimana pengamat (observer) secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati supaya mengerti terhadap sumber informasi yang diteliti (yusuf, 2015:388). Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, serta untuk menghimpun keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait yang dapat

membantu dan menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian yaitu di Dinas Pemakaman dan Pertamanan (DISKAMTAM) Kota Bandung untuk mengetahui bagaimana evaluasi program dari proses, implementasi dan dampak dari revitalisasi Taman Kota Bandung tahun 2013-2016.

b. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (yusuf, 2015:372). Pada tahapan wawancara subyek sasaran wawancara merupakan orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi yang sebenarnya terkait fokus penelitian sehingga data yang dihasilkan akurat. Dalam penelitian ini, pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* yaitu pemilihan subjek penelitian secara sengaja oleh peneliti (Sugiyono, 2013: 300). Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai narasumber sebagai berikut:

- a. Bapak Aming Priyatna selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung
- b. Bapak Dwi Priyono selaku Kepala Seksi Pembangunan Pertamanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung

c.

c. Dokumentasi

Menurut Bogdan & Biklen (1998:57) dokumen merupakan material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai dari kajian kasus yang sumber utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara (Ahmadi,2016:179). Sedangkan dokumentasi menurut (Herdiansyah, 2014:143) yaitu suatu metode pengumpulan kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek, untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara berupa foto, catatan, buku, agenda dan sebagainya. Kemudian, dokumen yang diperoleh dari dinas-dinas terkait berupa arsip kedinasan yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah analisa kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat menuturkan dan menafsirkan data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori. Proses penalaran data dan analisis berlangsung selama pasca

pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi (Salim, 2006: 22). Teknik analisa data yang digunakan dalam pengolahan penelitian ini adalah teknik primer dimana data yang dibutuhkan didapat langsung melalui wawancara langsung kepada responden yang menyangkut tentang: evaluasi program Pemerintah Kota Bandung dalam revitalisasi Taman Kota tahun 2013-2016.

Maka sebagaimana yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) terdapat tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan. Data yang diperoleh di lapangan tentulah banyak, untuk itu perlu direduksi, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data sudah dilangsungkan sejak peneliti mengambil keputusan, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian yang menekankan pada fokus tertentu tentang kerangka kerja konseptual dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan karena

teknik pengumpulan data tergantung pada jenis data yang akan digali dan jenis data ini sudah terarah dan ditentukan oleh beragam pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Tahap selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antarkategori. Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data. Penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan dengan menggunakan kalimat (teks yang bersifat naratif) dan bahasa peneliti yang merupakan kalimat yang logis dan sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami.

3. Penarikan Simpulan

Simpulan dilakukan sampai waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.